

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Banyak hal yang harus dilakukan dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat baik memberikan pelayanan maupun sebuah aturan untuk mengatur berbagai permasalahan yang ada serta membatasi tingkah laku masyarakat dimana pemerintah akan membuat suatu rancangan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Suatu kebijakan dibuat pemerintah memang dibuat secara sengaja oleh pemerintah, suatu kebijakan tidak dibuat hanya semata-mata atas kemauan pemerintah sendiri, namun kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk mengatasi masalah dalam negeri yang ada maupun merupakan tuntutan dari masyarakat sehingga memiliki dampak positif bagi negara itu sendiri.

Pernyataan Nugroho (dalam Handoyo, 2012: 6) bahwa, ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Pernyataan Nugroho yang bermaksud bahwa kebijakan publik merupakan suatu wadah untuk membuat suatu aturan untuk menangani dan melayani kepentingan masyarakat sehingga pemerintah membuat program serta aturan

kebijakan yang salah satunya adalah program PAUD bertujuan untuk melatih dan mengembangkan anak sejak dini. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Paterson (dalam Suparno, 2017: 9) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Sedangkan, Edi Suharto (dalam Suparno, 2017: 8) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Pernyataan diatas berkaitan dengan isu yang dipilih karena tingkat pendidikan di Indonesia masih belum cukup tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan program PAUD dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Sehingga kebijakan publik merupakan suatu aturan atau pedoman yang dibuat untuk dilaksanakannya berbagai kegiatan yang direncanakan dalam mengatasi berbagai fenomena masalah atau masalah yang sedang terjadi.

Berbagai pendapat yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan suatu rancangan tindakan-tindakan yang memiliki tujuan dan sasaran, yang diusulkan dan dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam ranah lingkungan tertentu yang berguna untuk memecahkan suatu fenomena masalah yang ada dengan memanfaatkan berbagai peluang serta digunakan untuk mengatasi suatu hambatan yang dihadapi, dengan begitu ditetapkanlah suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat secara jelas diikuti dengan

proses implementasi kebijakan tersebut. Umumnya dalam kebijakan publik terdapat formulasi yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan, implementasi yang digunakan untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah dibuat, serta evaluasi untuk melihat bagaimana hasil dari implementasi kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah sebuah kebijakan dibuat tentunya harus diterapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan mengetahui hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut, proses pelaksanaan ini adalah implementasi kebijakan. Menurut Abdul Wahab (dalam Suparno, 2017: 16) implementasi kebijakan berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran diwujudkan sebagai *outcomes* (hasil akhir dilakukan pemerintah. Dengan fungsi tersebut penyelenggaraan kebijakan akan dilakukan dengan cara dan sarana tertentu yang dirancang secara khusus sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2012: 94) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Grindle (dalam Handoyo, 2012: 95) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan begitu, tindakan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah harus lebih jelas sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti pernyataan Hill dan Hupe bahwa suatu kebijakan yang telah ditetapkan harus diterapkan sesuai keputusan yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan dari tujuan yang dibuat, sehingga penjelasan Grindle terkait implementasi yang dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, kaitannya dengan isu yang diambil yaitu proses pelaksanaan program PAUD harus memiliki kejelasan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana pentingnya pendidikan usia dini.

Tingkat pendidikan di Indonesia yang belum cukup tinggi membuat pemerintah menerapkan program PAUD, sehingga dengan program yang dijalankan ini diharapkan dapat mengatasi masalah pendidikan untuk meningkatkan moralitas anak dalam menghadapi masa depan Indonesia dan dunia.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kesimpulan yang di dapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan tindakan pelaksanaan pada waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan maupun kelompok swasta dalam melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga akan tepat sasaran dan berpengaruh baik atau memberikan dampak positif yang diharapkan maupun tidak diharapkan dalam suatu lingkungan tertentu.

2.3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirancang sedemikian rupa dan tujuan tersebut dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan nilai-nilai publik, misalnya keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Tidak hanya itu, nilai-nilai publik lainnya yang dapat diwujudkan seperti memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk. Hal ini juga dapat digunakan dalam memanfaatkan peluang dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti mendorong investasi serta mengalokasikan sumber daya alam yang diinovasikan sehingga memberikan hasil seperti infrastruktur, kebutuhan ekonomi, dan penunjang kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan mewujudkan nilai kepublikan juga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dapat membatasi perilaku dengan pembuatan peraturan undang-undang dan lainnya.

Tentunya untuk mewujudkan nilai publik dalam tujuan kebijakan yang telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan ini sebenarnya bermula sejak suatu rancangan kebijakan telah ditetapkan atau disahkan, dengan begitu akan dimulai tahap-tahapan implementasi dengan mengelola peraturan yang ada di dalamnya. Dampak tujuan kebijakan tentunya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat merubah hal buruk menjadi baik sehingga tahapan implementasi merupakan proses yang digunakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada adalah unsur pelaksana (implementor), adanya program yang akan dilaksanakan, dan *target groups* (Tachjan, 2006: 26). Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil (Tachjan, 2006:24).

Menurut Tachjan yang menyebutkan ada tiga unsur implementasi dalam melaksanakan suatu kebijakan, kita kaitkan dengan isu penelitian ini dimana program PAUD yang dibuat pemerintah akan dilaksanakan atau diterapkan dalam masyarakat dengan sasarannya adalah anak usia dini, untuk menjalankan program ini tentunya harus mengikuti proses implementasi yang rumit dalam mencapai tujuan, salah satunya sarana dan prasarana penunjang harus tersedia sesuai kebutuhan pelaksanaan program.

Proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku implementor yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kebijakan, hal ini juga menyangkut bagaimana jaringan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Melihat unsur-unsur dari implementasi sehingga untuk mencapai tujuan sasaran diperlukan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sesuai tanggung jawab mereka.

Menurut Ripley (dalam Erwan dan Dyah, 2015: 68-69), yang berpendapat bahwa implementasi dapat dilihat dari dua perspektif; *implementation studies have two major foci: "compliance" and "what's happening?"*. Perspektif pertama memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yang merupakan

kepatuhan implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Sedangkan perspektif kedua memahami keberhasilan implementasi tidak hanya mengenai kepatuhan implementer terhadap SOP yang telah dibuat, melainkan juga diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang dilihat dari munculnya dampak nyata kebijakan tersebut.

Kaitan pernyataan Ripley dengan isu adalah dimana pelaksana harus mengikuti aturan dalam program untuk membentuk suatu proses implementasi yang baik sehingga dengan mengikuti aturan dapat mempermudah implementasi program ini. Selain itu keberhasilan suatu program juga dapat dilihat dari bagaimana implementor melaksanakan dan merealisasikan program sehingga hasilnya dapat dilihat dari dampak yang muncul.

Implementasi yang merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Selain pemaparan mengenai pendapat para ahli sebelumnya, dalam kajian kebijakan publik yang di dalamnya terbagi menjadi tiga proses yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dari ketiga proses tersebut peneliti memilih berfokus pada implementasi kebijakan, yang mana dalam

implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi menurut para ahli yang dapat dipakai dalam analisis data penelitian.

Model implementasi yang pertama dikemukakan oleh Edward III (dalam Suparno, 2017: 33), yang mengatakan bahwa ada empat indikator yang akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model implementasi berikutnya dikemukakan oleh Grindle (dalam Suparno, 2017: 22, yang mengatakan bahwa ada dua indikator yang dipakai untuk bisa menganalisis kinerja implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sedangkan model implementasi menurut Elmor, dkk (dalam Yulianto, 2015:61) yang mengemukakan bahwa ada empat prinsip model implementasi dengan tahapan-tahapan, yaitu mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau pejabat pemerintah yang berada di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan dan keinginan publik yang menjadi target, dan prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Selanjutnya model implementasi Matland (dalam Yulianto, 2015: 77) yang mengemukakan ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

Selain itu salah satu model implementasi kebijakan untuk menganalisis fenomena masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Suparno, 2017: 29-30), ada enam indikator, yaitu Standar dan

Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi Implementor, Karakteristik Lembaga Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Selain model-model implementasi di atas, Adam Smith (dalam Pramono, 2020: 13-14) juga mengemukakan model implementasi yang dapat digunakan dalam suatu analisis penelitian, yang terdapat empat indikator:

1. Kebijakan Ideal (*Idealized policy*)

Yaitu pola interaksi yang di gagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang kelompok sasaran untuk melaksanakannya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksana memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran terkait kebijakan yang akan dilaksanakan serta bagaimana komunikasi yang terjadi dalam memberikan pemahaman tersebut sehingga kelompok sasaran termotivasi untuk mendukung kebijakan yang dilaksanakan tersebut.

2. Kelompok Sasaran (*Target groups*)

Yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran dalam program PAUD ini mendukung pelaksanaan program ini.

3. Organisasi Pelaksana (*Implementing organization*)

Yaitu badan pelaksana dan penanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Kaitannya dengan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran pelaksana PAUD dalam hal tanggungjawab dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program ini.

4. Faktor Lingkungan (*Environmental factors*)

Yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan. Hubungannya dengan penelitian adalah untuk melihat bagaimana faktor lingkungan yang terjadi pada lokasi penelitian serta bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Model implementasi yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas akan digunakan peneliti dalam menganalisis apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi program PAUD di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. Hal ini ditetapkan peneliti berdasarkan fenomena yang didapat oleh peneliti saat melakukan prasurvey serta mendapatkan identifikasi permasalahan, sehingga peneliti memilih indikator dari model implementasi Adam Smith yang telah disebutkan sebelumnya yang akan menjadi acuan peneliti untuk turun ke lapangan dalam mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dianalisis, karena relevan dan cocok untuk membahas identifikasi masalah yang peneliti dapatkan.

2.4. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir sampai dengan delapan tahun. Pendidikan pada tahap ini memfokuskan pada *physical, intelligence/cognitive, emotional, & social education*. Adapun tujuan utama pembelajaran anak usia dini adalah belajar melalui bermain dengan seoptimal mungkin menumbuhkembangkan semua potensi yang dibawa anak sejak lahir.

Proses pembelajaran pada anak usia dini seharusnya memiliki kebermaknaan melalui pengalaman nyata yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran tersebut dapat dimulai dengan membelajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh anak, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Itu arti orangtua di rumah dan guru di sekolah harus membelajarkan berbagai hal yang terkait dengan kemampuan untuk menolong diri sendiri agar anak dapat mandiri dan segera dapat mengurus dirinya sendiri, mulai dari mandi sendiri, makan dan minum, belajar memakai baju, celana dan sepatu sendiri. Pada akhirnya anak juga harus belajar untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, baik di lingkungan rumah, sekolah dan atau di masyarakat dimana ia tinggal. Kegiatan pendidikan seharusnya disusun dalam suatu rencana kegiatan pendidikan diarahkan pada tiga peran Pendidikan Anak Usia Dini (Yuliani, 2013:16), yaitu:

1. Pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak.

Anak harus diberikan kesempatan untuk belajar secara optimal, kapan saja dan di mana saja. Implementasinya terwujud dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mendengar, melihat mengamati, dan menyentuh benda-benda di sekitarnya.

2. Pendidikan sebagai proses sosialisasi.

Pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan dan membuat anak terampil, tapi juga membuat anak menjadi manusia yang bertanggung jawab, bermoral, dan beretika. Pendidikan yang mempersiapkan anak untuk mampu hidup sesuai dengan tuntutan jaman masa depan.

3. Pendidikan sebagai proses pembentukan kerja sama peran.

Dengan demikian anak dapat mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling melengkapi. Manusia membutuhkan orang lain karena secara individual memiliki kekurangan dan di sisi lain memiliki kelebihan yang memiliki nilai tambah bagi orang lain.

Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus kegiatan pendidikan bertujuan agar (Yuliani, 2013:48-49):

1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan Ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Contoh: pendidik mengenalkan kepada anak

didik bahwa Allah SWT menciptakan berbagai makhluk selain manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang semua itu harus kita sayangi.

2. Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik (panca indera). Contoh: Menari, bermain bola, menulis ataupun mewarnai.
3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Contoh: ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan kepada anak didik untuk bertanya atau menjawab isi tema yang telah dibahas.
4. Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. Contoh: mencari pasangan gambar yang berkaitan dengan sebab akibat, lalu anak akan berusaha memecahkan masalah dan memberikan alasan tersebut.
5. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki.
6. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. Contoh: anak yang senang dan menyukai dengan musik, saat mendengar lagu maka akan

segera mengikutinya, ataupun ketika diminta melanjutkan syair kedua hingga selesai, maka anak mampu melakukannya.

Hasil dari implementasi program PAUD diharapkan dapat memenuhi tujuan yang telah dibuat, dengan tujuan ini pelaksanaan program memiliki target yang akan dicapai, sehingga tidak terkecoh dan tetap mengikuti proses implementasi program.

2.5. Hasil Penelitian yang Relevan

Suatu penelitian memerlukan suatu pendukung penelitian yaitu hasil penelitian yang relevan, dengan hasil penelitian yang relevan ini seorang peneliti dapat melihat bagaimana hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian yang diambil.

Tabel 2.1.

Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti	Uraian	Persamaan/ Perbandingan
1	Rionata Kusuma	Judul: "Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. (2021) Hasil: Orang tua di Desa Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten	Persamaan: Sama-sama membahas terkait pendidikan anak usia dini, menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan <i>purposive sampling</i> untuk menentukan dan memilih responden.

	<p>Sambas telah berperan dalam mendidik membaca dan menulis Alqur'an pada anak-anaknya yang masih usia dini. Hal ini dilakukan, selain mengikuti ajaran agama Islam bagi umat muslim, juga merupakan suatu kewajiban orang tuanya yang telah mentradisi dari warisan orang tua mereka sejak dahulu. Dalam pelaksanaan mendidik membaca dan menulis Alqur'an pada anak-anak usia dini dilakukan melalui (a) sebagian orang tuanya yang mengajarkan sendiri kepada anak-anaknya membaca dan menulis Alqur'an di dalam lingkungan keluarganya, (b) sebagian lagi dari orang tua yang menitipkan anak-anaknya pada usia dini membaca dan menulis Alqur'an melalui Lembaga Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) yang ada di Desa Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan, dan (c) sebagian lagi dari orang tua telah menyerahkan mereka kepada guru ngaji disekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk mengajarkan anak-anaknya usia dini membaca dan menulis. Beberapa permasalahan yang dihadapi keluarga (orang tua) Desa Matang Tarap dalam mendidik membaca dan menulis Alqur'an antara lain; (a) masih sebagian dari orang tua yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam membaca dan menulis Alqur'an masih rendah, (b) sebagian orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari mencari nafkah yang kadangkala turun dari rumah pagi hari dan pulang sore, (c) sarana dan prasarana yang tersedia terutama untuk kegiatan formal di bidang keagamaan masih sangat minim.</p>	<p>Perbandingan: Terletak pada objek penelitian dimana oleh Rionata Kusuma, objek penelitian adalah "Peran keluarga dalam mendidik anak-anak membaca dan menulis Alqur'an: penelitian pada anak usia dini (paud) di Desa Matang Tarap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas", sedangkan objek penelitian yang ditulis peneliti/ penulis proses implementasi program PAUD di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.</p>
--	---	--

2	<p>Septiyana Bekti Nugrahaningsih</p>	<p>Judul: “Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2009”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. (2010)</p> <p>Hasil: Sosialisasi telah dilaksanakan, namun kurang maksimal karena belum rutin dan ada masyarakat yang belum memahami Program Pendidikan Anak Usia Dini. Pelaksanaan dilakukan dengan tiga tahap; (a) pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sudah memiliki tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan, memiliki anak didik, tenaga pendidik, tenaga pengelola, sarana dan prasarana, alat bermain edukatif dan program pembelajaran, (b) pelatihan kader PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan, (c) Pemberian dana berasal dari APBN, APBD I, dan APBD II, dalam pemberian dana tidak semua lembaga mendapatkannya karena keterbatasan dana dari pemerintah. Pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan, namun bagi PAUD nonformal belum ada peningkatan kualifikasi bagi pendidik karena lembaga masih swasta, belum semua pendidik terjangkau karena keterbatasan anggaran pelatihan, sedangkan pengawasan dilaksanakan tiap satu kali persemester. Faktor pendukung dan penghambat; (1) Sikap pelaksana sudah mendukung pelaksanaan program dengan pendidik bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, (2) komunikasi antar pelaksana mendukung dan lancar karena dengan adanya komunikasi ini lembaga sudah paham mengenai program PAUD, (3) sumber daya seperti SDM sudah</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait pendidikan anak usia dini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan <i>purposive sampling</i> untuk menentukan dan memilih responden</p> <p>Perbandingan: Terletak pada objek penelitian yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program PAUD serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat program PAUD di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2009, sedangkan penulis berfokus pada apa faktor yang menghambat proses pelaksanaan implementasi program PAUD di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.</p>
---	---	---	--

		memadai, sumber dana masih terbatas, sarana dan prasarana sudah cukup, namun masih kurang pada alat permainan, (4) struktur birokrasi masih terhambat terutama saat pemberian dana bantuan maupun honor harus melalui proses yang panjang sehingga sering terjadi keterlambatan.	
3	Susanti	<p>Judul: “Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi”. (2021)</p> <p>Hasil: Sosialisasi dalam pelaksanaan program PAUD di Desa Lintah Taum telah melaksanakan sosialisasi secara langsung melalui forum warga dan dalam sosialisasi tersebut mereka telah memberikan materi terkait program PAUD, sehingga sosialisasi sudah dilakukan dengan cukup baik. Penyaluran dana yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik dan tepat sasaran sehingga dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penunjang program PAUD. Pemanfaatan dana yang diberikan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung, membeli seragam, ATK, dan sebagainya serta untuk memberi gaji atau membayar honor kepada tenaga pendidik di PAUD Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait pendidikan anak usia dini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan <i>purposive sampling</i> untuk menentukan dan memilih responden.</p> <p>Perbandingan: Terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian membahas bagaimana proses implementasi yang terjadi di PAUD Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi, sedangkan peneliti dengan objek berfokus pada apa faktor yang menghambat proses pelaksanaan implementasi PAUD di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.</p>

2.6. Kerangka Pikir

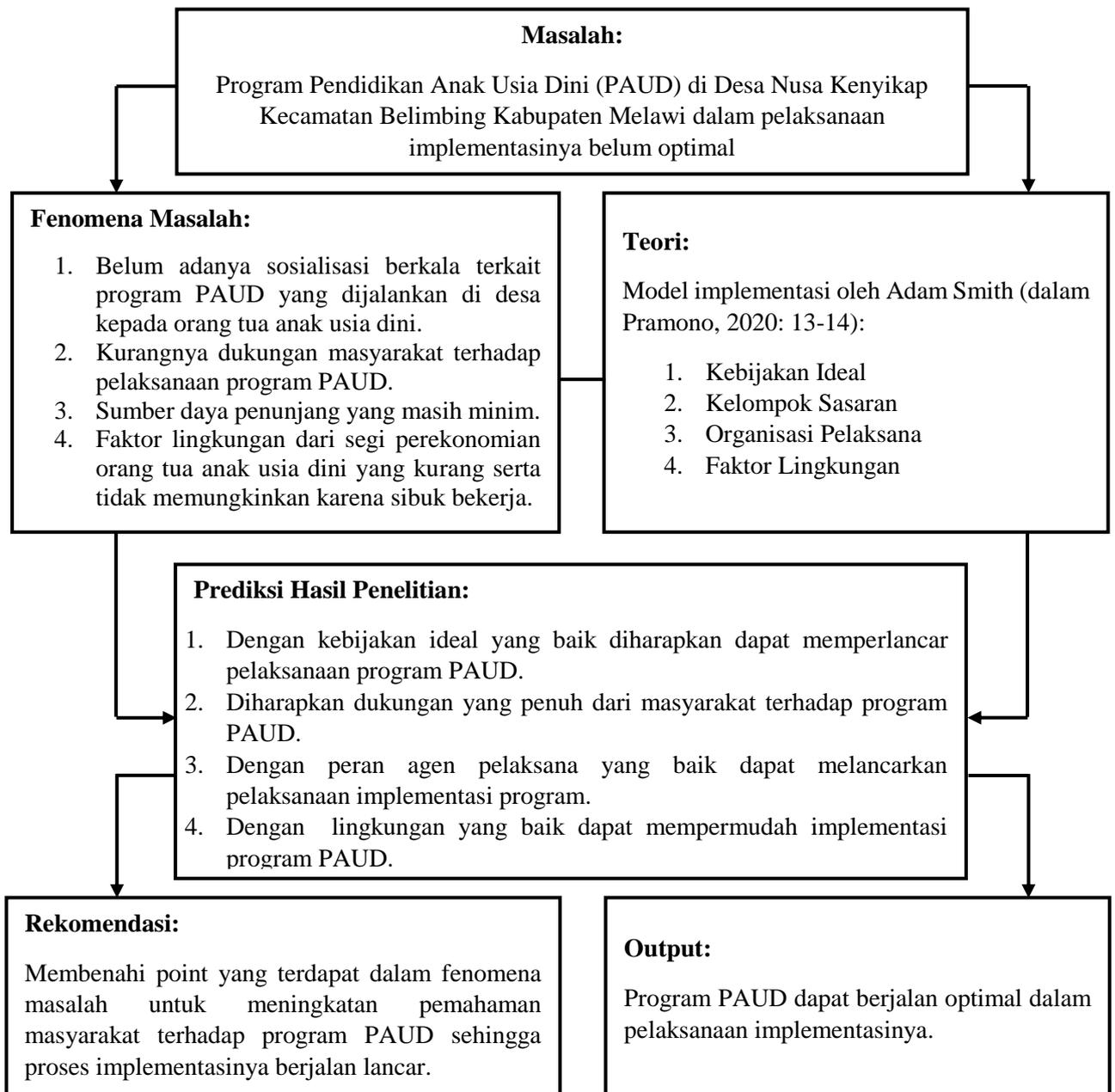
Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dalam proses Implementasi Program PAUD di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi memerlukan kerangka pikir untuk mempermudah dalam membantu memecahkan

masalah dalam penelitian. Kerangka pikir tersebut merupakan teori yang bertitik tolak pada ahli. Kerangka pikir peneliti akan mengacu pada pendapat para ahli yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian, sebagai dasar dan pedoman yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Berdasarkan fenomena masalah yang ditemukan peneliti mengajukan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyebutkan ada empat indikator yang dapat dianalisis dalam implementasi kebijakan, yaitu Kebijakan Ideal (*Idealized policy*), Kelompok Sasaran (*Target groups*), Organisasi Pelaksana (*Implementing organization*), dan Faktor Lingkungan (*Environmental factors*).

Skema 3.1.

Alur Pikir Penelitian “Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten
Melawi”



Sumber: Penulis, 2021

2.7. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah, sehingga pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan ideal yang terjadi dalam Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?
2. Bagaimana dukungan kelompok sasaran yang terjadi dalam Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?
3. Bagaimana tanggungjawab pelaksana kebijakan yang terjadi dalam Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?
4. Bagaimana faktor lingkungan yang terjadi dalam Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?